



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
15. Keputusan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
16. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/053/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019, Sebagaimana Tersebut Dalam Lampiran I Keputusan Ini
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor. 555/ /2019 Tahun 2019 sebagaimana dalam lampiran II Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dibetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Rembang
Pada tanggal :

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG



Ir. WARTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600110 199103 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Jl. Gatot Subroto No.8 Rembang Telp (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425
Website : dinkominfo.rembangkab.go.id e-mail : dinkominfo@rembangkab.go.id

R e m b a n g - K o d e P o s 5 9 2 1 1

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN REMBANG

Nomor : 555/ / /2019

Tanggal :

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	000 UMUM				
1.	Arsip peta foto udara	<ul style="list-style-type: none">➤ UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3;➤ Pasal 17 UU NG 14 Th 2008 Huruf i dan j	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama di dalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam
2.	Dokumen kekayaan intelektual oleh lembaga /swasta /kelompok /perseorangan	<ul style="list-style-type: none">➤ UU Nomer 19 tahun 2002 tentang hak cipta➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan j	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat ; berpotensi pelanggaran hukum /pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat ; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang bersangkutan

1	2	3	4	5	6
3.	Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; ➤ Pasal 17 UU NG 14 Th 2008 Huruf i dan j 	Mengganggu kebijakan pemerintahan / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah /pimpinan	Tidak terbatas
4.	Memorandum / surat-surat antar dan inter badan publik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; ➤ Pasal 17 UU NG 14 Th 2008 Huruf i dan j 	Menghambat kebijakan pemerintahan daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan
5.	Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan; ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf i dan j 	Dapat mengganggu proses penyesuaian kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat
6.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindah tangan barang daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan ; ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e dan j 	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai	Setelah proses selesai
7.	Surat pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkapkan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
8.	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan kepala /wakil kepala daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 23 Th 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2015 	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)	Sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan (taat asas)	Setelah proses pengesahan /pengangkatan selesai

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf i dan j 			
9.	Proses pengangkatan perangkat desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No.14 Tahun 2008 Huruf I dan j ➤ PP No. 47 Tahun 2014 Tentang Desa ➤ Permendagri No.81/82 Tahun 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap	Tidak terbatas
10.	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 1981, pasal 70 ayat (2) ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a, i, dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan / penyidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses hukum / penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
11.	Soal ujian tertulis pengangkatan perangkat desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 6 Th 2014 tentang desa ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf i dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
12.	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian kepala desa dan pengangkatan Plt kades	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 6 Th 2014 tentang desa ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf i dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
13.	Rancangan keputusan bupati pada saat proses harmonisasi di bagian hukum	UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan J	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
14.	Dokumen dan informasi perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
15.	Dokumen proses penyelesaian sengketa / konflik lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
16.	Informasi data pribadi penegak perda	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
17.	Berita Acara pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 8 Th 1981 tentang Hukum acara pidana ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses hukum / penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang 	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
				menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan	
18.	<p>Dokumen Hasil Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Pimpinan DPRD ➤ Rapat Konsultasi ➤ Rapat Badan Musyawarah ➤ Rapat Badan Anggaran ➤ Rapat Badan Kehormatan 	<p>Peraturan DPRD No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pasal 71 ayat (2) & (3), pasal 72 dan 73 ayat (1), (2), (3), dan (4)</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan (pasal 73 ayat (1)) 2. Materi yang diperoleh dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat (pasal 73 ayat (2)) 3. Setiap orang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagai mana dimaksud ayat (2), wajib merahasiakannya 4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	-
	200 POLITIK				
19.	<p>Proses keputusan mendagri tentang peresmian dan pemberhentian</p>	<p>UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I</p>	<p>Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</p>	<p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4	5	6
	pengangkatan anggota / pimpinan DPRD				
20.	Proses penetapan keputusan gubernur jawa tengah peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota /pempinan DPRD kabupaten kota	UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak terbatas
21.	Data kegiatan intelejen terkait dengan ideologi ,politik ,sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang menanggangu masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan J 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan / atau daerah / wilayah 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan / atau daerah / wilayah 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
22.	Data eks tapol G30S/PKI	Intruksi Mendagri No.32/1981	Memicu konflik antar masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat	Sampai terbitnya regulasi baru
23.	Dokumen Pertahanan	UU Pertahanan No.10/1981	Kerahasiaan Hak Kepemilikan	Penyalahgunaan wewenang	Selama kepemilikan tidak berubah
300 KEAMANAN DAN KETERTIB AN UMUM					
24.	Peta lokasi penyimpanan arsip	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat (3) ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan J 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
25.	Identitas korban yang dirujuk di pusat pelayanan terpadu BP3AKD provinsi jateng	➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
26.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditanggapi PPNS	➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a, i, dan j ➤ Kep menghukham No 1 tahun 2003 tentang permendagri no 4 tahun 2007 tentang PPNS di lingkungan pemda	1. Dapat menghambat proses Hukum/penyelidikan/penyidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusuna kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	1. Memperlancar proses hukum / penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusuna kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan	Tidak terbatas
27.	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	➤ UU No 23 Tahun 2014 ; ➤ UU No 14 Th 2008 ,Pasal 17 huruf a, i, dan j ➤ PP No 6 Tahun 2010 ;	1. Dapat menghambat proses Hukum/penyelidikan/penyidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusuna kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	1. Memperlancar proses hukum / penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusuna kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan	Tidak terbatas
	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT				
28.	Usulan calon penerima bantuan sosial	UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf e	Dapat merugikan ketahanan ekonomi	Melindungi ketahanan ekonomi	Tidak terbatas
29.	Rencana alokasi bersubsidi	UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf e	Dapat merugikan ketahanan ekonomi	Melindungi ketahanan ekonomi	Tidak terbatas
30.	Naskah soal UN/ UNPK/ UASBN, dll	➤ UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j; ➤ Permendiknas ,Petunjuk	1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		operasional sistem	informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap	
31.	Proses scanning UN/ UNPK/ UASBN	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j; ➢ Permendiknas ,Petunjuk operasional sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
32.	Proses rekrutmen siswa pusat pendidikan latihan olahraga pelajar (PPLP), Petukaran pemuda antar negara (PPAN), sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3) DAN PEMILIHAN PASKIBRA	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 3 Th 2005 pasal 21 ayat (3) dan ayat (4); ➢ UU no 40 Th 2009 pasal 27 ayat (3) ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf i dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
33.	Dokumen rekam medis termasuk nomor tegristasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 35 Th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1); ➢ UU No 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 47 ayat (2) ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf h dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
34.	Laporan kasus / diagnosa penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 35 Th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1) ➢ Pasal 17 UU NO 14 Th 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi data pribadi dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya 	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		2008 huruf h dan j	lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap	
35.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf c ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf h dan j ➤ Permenkes No 1419/MENKES/ PER/ X/ 2005 Pasal 18 ayat (1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkap rahasia pribadi dan 2. Dapt mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi data pribadi dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
36.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepmenkes No 496/ Menkes /SK /IV /2005 ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 huruf h dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan	Tidak terbatas
37.	Proses penentuan penerimaan bantuan kepada pemerintah desa/ kelurahan dan kelompok masyarakat	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf i	Dapat merugikan proses kebijakan penyusunan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak terbatas
38.	Hasil diagnosa / bedah kasus calon kelayan (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan teerhambat 	Tidak terbatas
39.	Data kelayan UPT (penyediaan HIV/AIDS) dan eks WTS)	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf i	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang	Tidak terbatas
40.	Data pribadi penduduk	➤ UU NO 14 Th 2008	Bertentangan dengan hak pribadi	Menjaga privasi seseorang	Atas ijin yang bersangkutan

1	2	3	4	5	6
		<p>Pasal 17 h dan j</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Bab VII Bagian kedua pasal 58 dan 59 	/privasi yang berpotensi disalahgunakan	yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi	dan kepentingan public berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan public
41.	Daftar rekam medik PNS	UU No 14 Tahun 2008 ,pasal 17 huruf h dan huruf j	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan selama menjadi PNS
42.	Data kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No 14 Tahun 2008 ,pasal 17 huruf h, i dan j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat 	Atas izin yang bersangkutan dan izin pemangku kepentingan kebijakan
43.	Catatan Rekam Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 (ayat (2)) ➤ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/ Menkes/ III/ 2008 tahun 2008 tentang Rekam Medis pasal 10 ayat (1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Bisa mengganggu proses penyembuhan penderita 	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Sampai dengan ada peraturan lain.
44.	Informasi Hasil Pemeriksaan diagnosis HIV	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 h 2008 tentang KIP pasal huruf h dan i ➤ Peraturan Menteri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Bisa menimbulkan keresahan masyarakat (takut tertular 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan keluarga 2. Bisa membantu 	Sampai dengan ada peraturan lain.

1	2	3	4	5	6
		Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pasal 21 ayat 3.	meskipun tidak meski terjadi). 3. Dapat mengganggu kondisi kejiwaan penderita.	penyembuhan pasien.	
45.	Data penderita HIV/AIDS	UU No 14 Tahun 2008 ,pasal 17 huruf h dan j	Potensi menimbulkan kerawanan /kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisa kebijakan daerah	Atas izin yang bersangkutan
46.	Dokumen kependudukan yang meliputi : a Bio data penduduk b KK c KTP d Surat Keterangan Kependudukan e Akta Kependudukan Sipil	UU No.23/2006 Tentang administrasi kependudukan	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan masih hidup
47.	Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ➤ UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat	Tidak Terbatas
48.	Data PMKS by name by address	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Dapat merugikan prpses penyusunan kebijakan	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat	Tidak Terbatas
49.	Data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) by name	UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
	by address	Sosial	2. Dapat merugikan prpses penyusunan kebijakan	2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat	
	500 PEREKONOMIAN				
50.	Surat perijinan/ijin usaha beserta dokumennya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 43 Tahun 2008 tentang kearsipan ➤ UU NO 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan j 	Mengungkap data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama izin masih dipergunakan
51.	Data kekayaan alam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No.43 Tahun 2008 tentang kearsipan ➤ UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d & j 	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah
52.	Kajian pemerintah pusat dan berita acara pelepasan tanah kas daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan ➤ UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e & j 	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembagunan	Setelah kebijakan diputuskan oleh pemerintah
53.	Kajian pemerintahan pusat dan berita acara pelepasan tanah aset pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan ➤ UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e dan j 	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembagunan	Sampai proses selesai
54.	Berita sandi	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
55.	Spesifikasi saran komunikasi	UU No 14 Tahun 2008	Dapat membahayakan pertahanan	Melindungi pertahanan dan	Selama pengungkapannya

1	2	3	4	5	6
	sandi	tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	an dan keamanan negara	keamanan negara	membahayakan keamanan negara
56.	Perangkat khusus persandian	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
57.	Kunci sistem sandi	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
58.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
59.	Jalur komunikasi VVIP	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
60.	Frekuensi radio komunikasi persandian	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
61.	Berita/radiogram rahasia	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
62.	Data teknik potensi air tanah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan j ➤ PP No 43 Th 2008 pasal 88 tentang air tanah pasal 23 ayat (3) 	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada
63.	Wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) / koordinat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 4 Th 2009 pasal 88 ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf b, d, dan 	Potensi timbulnya manipulasi data oleh pihak pemakai	Mengamankan dari potensi adanya manipulasi	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
		j			
64.	Data teknis hasil kegiatan survei pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi panas bumi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 27 Th 2003 tentang panasbumi pasal 4 ayat (3) ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf d dan j 	Berpotensi terbukanya investasi yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat	Mendorong eksplorasi dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat luas	Tidak Terbatas
65.	Surat pengajuan hak merk, cipta, paten, dan desain yang masih dalam proses KEMENHUKHAM	UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf b	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain	Tidak Terbatas
66.	Data debitur dana bergulir	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 3	Informasi dapat disalahgunakan dan berpotensi merugikan orang lain	Menghindari informasi yang keliru yang bisa merugikan orang	Tidak Terbatas
67.	Surat keterangan asal (SKA) barang, penerbitan surat pemberitahuan ekspor kopi (SPEK), penerbitan angka pengenal impor (API) dan dokumen lainnya dibidang perdagangan luar negeri	UU NO 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Potensi munculnya manipulasi yang dilakukan oleh pelaku usaha	Menjaga dari potensi manipulasi yang dilakukan oleh pengusaha	Setelah dokumen tidak diperlukan lagi karena berhentinya usaha yang telah dilakukan
68.	Data jaringan bisnis perusahaan/ badan usaha	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Berpotensi munculnya persaingan tidak sehat	Menjamin iklim persaingan usaha yang sehat	Apabila sudah tidak memiliki manfaat ekonomis
69.	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf b,i dan j 	Dpat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selam masih digunakan
70.	Internet protocol/IP address private	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku

1	2	3	4	5	6
		<p>pasal 25</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UU NO 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b ,i dan j 			
71.	Bandwidht management	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➤ UU NO 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b ,i dan j 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
72.	Sistem keamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➤ UU NO 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b ,i dan j 	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/ merugikan keuangan negara	Terjadi dari potensi kerugian	Selama masih digunakan/berlaku
73.	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf i dan j 	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesiao dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai/ diketahui pemenangnya
74.	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j ➤ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
75.	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j ➤ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran kontrak selesai

1	2	3	4	5	6
		barang/ jasa pemerintah			
76.	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j ➢ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah 	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses pengadaan barang/jasa
77.	Hasil uji laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan i	Bisa berpotensi dipalsukan	Mencegak pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Sampai diketahui hasil uji lab
78.	Hasil laboratorium pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e dan i	Bisa berpotensi dipalsukan dan disalahgunakan	Mencegak pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Sampai diketahui hasil uji lab
79.	Proses penetapan penerimaan bantuan sosial kemasyarakatan	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf i	Berpotensi menimbulkkan kerawanan dan persaingan di dalam masyarakat	Memuluskan perencanaan program yang dibuat pemerintah	Sampai penetapan penerimaan bantuan
80.	Dokumen Perijinan	UU No.20/2008 Tentang usaha mikro, Kecil dan Menengah	Bisa menimbulkan persaingan tidak sehat	Menjaga persaingan yang sehat	Tidak Terbatas
	600 PEKERJAAN UMUM DAN KENAGAAAN				
81.	Biodata individu dan dat keluarga : a Ketenagakerjaan b Transmigrasi c	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf H	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum
82.	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada	➢ UU No 23 Th 2006 tentang administrasi	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan

1	2	3	4	5	6
	perusahaan di indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kependudukan ➤ UU NO 14 Th 2008 ➤ Pasal 17 Huruf h,I,j 			penegakan hukum
	7 00 PENGAWASAN				
83.	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU NO 14 Th 2008 ➤ Pasal 17 Huruf I dan j ➤ Kepmenkes No 496/menkes/SK/IV/2005 	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan	Menjaga privasi seseorang	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas izin penerima hasil audit
84.	Hasil monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa atau kelurahan dan kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 48 Th 2009 ,Pasal 6 ayat (2) ➤ UU NO 14 Th 2008 ➤ Pasal 17 Huruf I dan j 	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik	Sampai selesainya monitoring dan upaya tindak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang terjadi
85.	Dokumen hasil pengawasan melekat (Waskat)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU NO 14 Th 2008 ➤ Pasal 17 huruf h, I dan j ➤ Kepmenpan No KEP/46/M. DAN/4/2004 tentang petugas pengelolaan pengawasan melekat dan pengawasan pemerintahan 	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan	Atas izin dari pihak yang menjadi subjek pengawasan
86.	Rencana pengawasan usaha atau kegiatan oleh PPLHD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 32 Th 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ➤ UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, I dan j 	Atas ijin dari pihak yang usahanya diawasi	Mengganggu asas pelaksanaan pengawasan: hanya ditujukan untuk yang dilakukan pengawas	Sesuai dengan asas pengawasan dalam rangka perbaikan

1	2	3	4	5	6
87.	Naskah hasil pemeriksaan (NHP), dan kertas kerja pemeriksaan (KKP)	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf I dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin dari pihak yang diperiksa
88.	Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf I dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum
800 KEPEGAWAIAN					
89.	Soal-soal ujian	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat (3) ➢ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf I dan j 	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut
90.	Penelitian uji kompetensi	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf H	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesainya uji kompetensi
91.	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf H	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan
92.	Data hasil Check up perorangan PNS/pejabat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf H	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum
93.	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/pejabat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf H	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada izin yang bersangkutan
94.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf a dan Huruf h	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan
95.	Data rencana penempatan PNS / CPNS	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf a dan	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih	Sampai selesainya proses penempatan dari yang

1	2	3	4	5	6
		Huruf I		tertib	bersangkutan
96.	Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf h dan Huruf I	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindak lanjuti
97.	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf I dan j ➤ PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan structural, pasal 14 	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti
98.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> ➤ -PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan structural, pasal 14 ➤ -UU No 14 tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf I dan j 	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
99.	Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j ➤ PP No 100 Th 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabtan struktural, bab III ; ➤ Keputusan kepala BKN nomer 13 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP no 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan 	Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditata usahakan sampai 30 tahun

1	2	3	4	5	6
		struktural, sebagaimana di ubah dengan PP No 13 tahun 2002, lampiran I angka romawi II huruf B nomor 4 dan 5, dan huruf c dan d			
100.	Soal tes CPNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	3. Dapat mengganggu proses rekrutmen PNS dan merusak kerahasiaan seleksi	Menjaga akuntabilitas seleksi	Sampai selesainya tes/seleksi
101.	Dokumen pengangkatan, pemindahan guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 14 Th 2008 Pasal 17 huruf i dan j ➢ Peraturan menteri pendidikan nasional No 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah 	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan
102.	SK pengangkatan, pemindahan guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 14 Th 2008 Pasal 17 huruf i dan j ➢ Peraturan menteri pendidikan nasional No 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah 	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan
103.	Daftar nilai DP3 PNS dan SKP	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i dan j ➢ PP No 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS Pasal 5/6 	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan	Atas izin yang bersangkutan
104.	Keputusan penjatuhan hukum	➢ PP No 53 tahun 2010	Dapat berpotensi mengganggu	Menjaga obyektifitas	Sampai turunnya penjatuhan

1	2	3	4	5	6
	disiplin PNS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perka BKN no 21 tahun 2010 romawi IX angka 8 UU No 1 dan juga KIP Pasal 17 huruf a ,huruf h dan huruf i 	obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	putusan	hukum disiplin
105.	Keputusan izin/ keterangan tentang perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i ,dan j ➤ PP No 10 tahun 1983 jo.PP No 45 tahun 1990 	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan izin	Sampai keluarnya keputusan izin
106.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a Kenaikan pangkat b Kenaikan gaji berkala c Mutasi d Pesiu e Administrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j ➤ PP No 9 tahun 2003 tentang pengangkatan, pe mindahan ,dan pemberhen tian PNS ;UU No 9 tahun 1974 jo.UU no 43 tahun 1989 tentang pokok-pokok kepegawaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
107.	Biodata elektronik PNS lengkap	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11 Th 2008 tentang ITE ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP,P asal 17 huruf h, I & j 	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Selama masih bersangkutan jadi PNS
108.	Data kepegawaian perorangan PNS lengkap	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 9 tahun 1974 jo.UU No 43 tahun 1989 tentang pokok-pokok kepegawaian 	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan privasi seseorang	Selama masih bersangkutan berstatus sebagai PNS

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h,I, & j 			
109.	Arsip data perseoranagan PNS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 9 tahun 1974 jo.UU No 43 tahun 1989 tentang pokok-pokok kepegawaian ➤ UU no 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h,I, & j 	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan privasi seseorang	Selama masih bersangkutan berstatus sebagai PNS
110.	Daftar usulan pengangkatan dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan j ➤ PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan	Setelah usulan direalisasikan
111.	Daftar pejabat yang akan dilantik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j ➤ PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, BAB III Keputusan kepala BKN No 13 Th 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP No 100 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural, sebagai mana diubah dengan PP No 13 Th 200,Lampiran I Angka romawi II huruf 	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK/ pelantiakan

1	2	3	4	5	6
		B No 5			
112.	Daftar nominasi (rangking) Pejabat struktural	UU No 14 Th 2008 Pasal 17 huruf I	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK/ pelantikan
113.	Instruksi tes potensi / kompetensi PNS / pejabat	UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf I	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung	Selama masih berlaku dan diberlakukan dalam proses tes potensi/ kompetensi PNS atau pejabat
114.	Identifikasi potensi PNS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf h, I ,dan j ➢ Keputusan kepala BKN No 37 tahun 2011 tentang pedoman penataan PNS 	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan di ambil	Mengamankan proses paengam bilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
115.	Data Diri Pegawai	UU Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
116.	Informasi public apabila di buka dan di berikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkapkan rahasia pribadi PNS :				
	a. Biodata Pegawai	Undang-undang No.08/1974 Tentang pokok-pokok Pegawaian Jo. UU No.43/1999	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data	Selama yang bersangkutan menjadi PNS 2. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
	b. Hasil SKP (Saran Kinerja Pegawai)	PP No.46/2011 Prestasi Kerja PNS tentang penilaian	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Bersifat terbuka dalam proses management, tetapi tidak

1	2	3	4	5	6
					dipublikasikan (terbatas untuk management pegawaiian)
	c. Kondisi keuangan asset, pendapatan dan No. Pin Rekening Bank PNS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11/2008 Tentang ITE ➤ UU NO. 14/2008 Tentang KIP Pasal (17) Huruf H angka 3 	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data	Selama menjadi pegawai
	d. Hukuman disiplin pegawai	PP No.56/2012	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Selama regulasi masih berlaku
	e. Ijin Perceraian PNS	UU No.08/1974 Tentang Izin Perkawinan atau Perceraian	Pihak luar campur tangan	Kelancaran Proses perceraian	Proses perjanjian sampai dengan penjatuhan keputusan
117.	Informasi public apabila di buka dan di berikan kepada pemohon				
	a. Biodata Pegawai	Undang-undang No.08/1974 Tentang pokok-pokok Pegawaiian Jo. UU No.43/1999	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi dari penyalahgu naan data	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS 2. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
	b. Hasil SKP (Saran Kinerja Pegawai)	➤ PP No.46/2011 Tentang penilaian Prestasi Kerja PNS	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Bersifat terbuka dalam proses management, tetapi tidak dipublikasikan (terbatas untuk management pegawaiian)
	c. Kondisi keuangan asset, pendapatan dan No. Pin Rekening Bank PNS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11/2008 Tentang ITE ➤ UU NO. 14/2008 Tentang KIP Pasal (17) Huruf H angka 3 	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi dari penyalahgu naan data	Selama menjadi pegawai
	d. Hukuman disiplin pegawai	PP No.56/1974	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Selama regulasi masih berlaku

1	2	3	4	5	6
	e. Ijin Perceraian PNS	UU No.08/1974 Tentang Izin Perkawinan atau Perceraian	Pihak luar campur tangan	Kelancaran Proses perceraian	Proses perjanjian sampai dengan penjatuhan keputusan
118.	Gaji Pegawai Negeri Sipil	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PP No.51 Tahun 1992 tentang perubahan ketiga atas PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil ➤ PP No.30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 	-	Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyimpan rahasia jabatan, gaji, tunjangan dan fasilitas	-
119.	Rahasia Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 3 poin 8 ➤ UU No.8 kepegawaian pasal 6 ayat (1) alenia pertama 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut permintaan harus dirahasiakan 2. Kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, apa bila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak (penjelasan pasal 6 ayat 1 alenia pertama UU 	

1	2	3	4	5	6
				No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian	
	900 KEUANGAN				
120.	Dokumen laporan/ surat bertanggungjawaban keuangan / SPJ berikut lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2) ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf i, dan j 	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum di audit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diferivikasi oleh aparatur pemeriksa / pengawasan / auditor (DPKP /BPK)
121.	Rencana alokasi data talangan untuk kabupaten	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Menghambat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat	Mengamnakan kebijakan pusat kedaerah	Sampai ditetapkan setelah persetujuan DPRD
122.	Database obyek pajak dan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 40 ➤ UU no 14 Th 2008 Pasl 17 huruf i dan j 	Melanggar privasi wajib pajak / retribusi	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi	Atas izin yang bersangkutan
123.	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 32 Th 2004 tentang pemerintahan daerah dan perubahannya; ➤ UU No 14 Th 2008 Pasal 17 huruf I dan j ➤ Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 	Sesuai dengan asas pengelo laan administrasi keuangan	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan
124.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan	Melancarkan alur kegiatan	BKAD

1	2	3	4	5	6
125.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Kemendagri tentang transparansi pengelolaan	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit belum	Sampai Audit Selesai
126.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Kemendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit belum	Sampai Audit Selesai
127.	Kode akses elektronik aplikasi SIMDA	UU No.11/2008 Tentang ITE Pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
128.	Dokumen laporan/ surat bertanggungjawaban keuangan / SPJ berikut lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2) ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf i, dan j 	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum di audit	Mendorong keberhasilan pelak sanaan pembangunan	Sampai dengan telah diferivikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/ auditor (DPKP /BPK)
129.	Rencana alokasi data talangan untuk kabupaten	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Menghambat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat	Mengamnakan kebijakan pusat kedaerah	Sampai ditetapkan setelah persetujuan DPRD
130.	Database obyek pajak dan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 40 ➤ UU no 14 Th 2008 pasal 17 huruf i dan j 	Melanggar privasi wajib pajak / retribusi	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi	Atas izin yang bersangkutan
131.	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 32 Th 2004 tentang pemerintahan daerah dan perubahannya; ➤ UU No 14 Th 2008 Pasal 17 huruf I dan j ➤ Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan
132.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan	Melancarkan alur kegiatan	BKAD

1	2	3	4	5	6
133.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Kemendagri tentang transparansi pengelolaan	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit belum	Sampai Audit Selesai
134.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Kemendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit belum	Sampai Audit Selesai
135.	Kode akses elektronik aplikasi SIMDA	UU No.11/2008 Tentang ITE Pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

Ditetapkan : Di Rembang
Pada tanggal :

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG



Ir. WARTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600110199103 1 008